

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan daerah, merupakan amanah yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah, untuk mengelola urusan keuangannya sendiri dengan menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas. Sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan, mengenai pengelolaan keuangan daerah, Pengelolaan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan disajikan secara wajar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, serta untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dengan demikian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang didukung oleh PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, PP nomor 56 tahun 2006 tentang sistem informasi keuangan daerah, Permendagri

nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif (Dadang Suwanda, 2015:33)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Penyusunan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan serta segala aktivitas transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari : (Dadang Suwanda, 2015:67)

1. Laporan keuangan pemerintah pusat;
2. Laporan keuangan pemerintah daerah
3. Laporan keuangan satuan organisasi dilingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang menurut

peraturan perundang-undangan wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruah Pada Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menyusun laporan keuangan tahun 2017 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017.

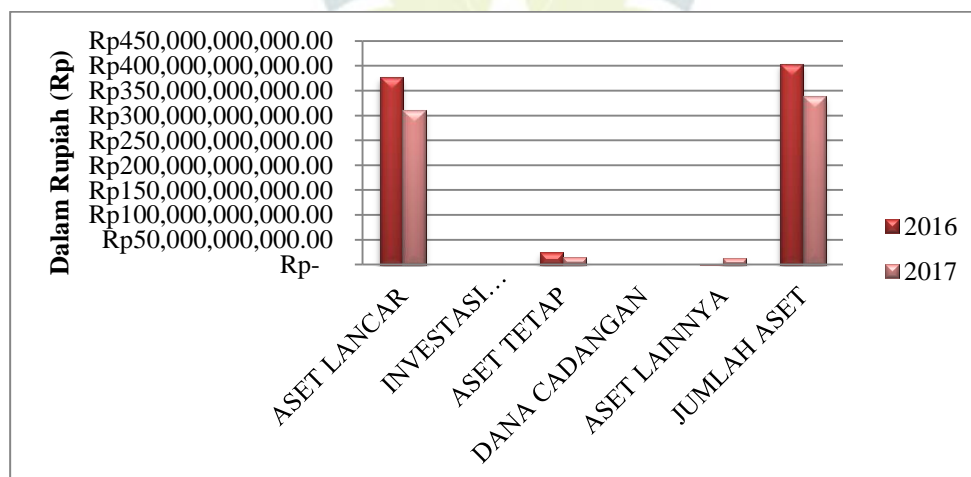
Dengan demikian, salah satu mewujudkan laporan keuangan BPPD Kota Bandung yang komprehensif, dengan penyusunan laporan keuangan neraca . Aset pemerintah daerah, merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca, menggambarkan kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Melalui informasi aset yang disajikan pada neraca, pembaca laporan keuangan dapat melihat kondisi kekayaan pemerintah daerah disimbolkan dalam neraca berupa jumlah aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki. Namun, pada laporan SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, terjadi penurunan pada komponen aset dalam neraca sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Persentase Pencapaian Akun Aset Pada Neraca BPPD Kota Bandung
2016-2017

NAMA AKUN	2016	2017	%
ASET LANCAR	Rp 377,498,757,350.31	Rp 310,672,119,408.90	82%
INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp -	Rp -	
ASET TETAP	Rp 24,323,932,834.00	Rp 14,986,514,125.00	62%
DANA CADANGAN	Rp -	Rp -	
ASET LAINNYA	Rp 1,685,413,000.00	Rp 13,820,313,073.00	820%
JUMLAH ASET	Rp 403,508,103,184.31	Rp 339,478,946,606.90	84%

(Sumber : Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung 2017, data diolah oleh penulis)

Gambar 1. 1
Persentase Pencapaian Akun Aset Pada Neraca BPPD Kota Bandung
2016-2017



(Sumber : Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung 2017, data diolah oleh penulis)

Dari tabel 1.1 dan gambar 1.1, dapat dilihat perbandingan pencapaian jumlah aset di tahun 2017 dan 2016 aset lancar hanya 82%, BPPD Kota Bandung tidak memiliki investasi jangka panjang di tahun 2016 maupun di tahun 2017, aset tetap 62%. BPPD Kota Bandung tidak memiliki dana cadangan di tahun 2017 dan 2016, kenaikan pada jumlah akun aset lainnya hingga 820%, namun pada jumlah total aset hanya mencapai 84%. Kemudian pada grafik 1.1 diagram batang berwarna merah tua menunjukkan jumlah aset pada tahun 2016 sedangkan diagram

batang merah muda menunjukkan jumlah aset pada tahun 2017. Seperti yang terlihat pada grafik, bahwa terjadi penurunan jumlah aset pada akun aset lancar, aset tetap, dan jumlah total keseluruhan aset.

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Jumlah Aset per akun Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2016-2017

NAMA AKUN	2016	2017	Pertumbuhan
ASET LANCAR	Rp 377,498,757,350.31	Rp 310,672,119,408.90	-18%
INVESTASI JANGKA PANJANG	Rp -	Rp -	
ASET TETAP	Rp 24,323,932,834.00	Rp 14,986,514,125.00	-38%
DANA CADANGAN	Rp -	Rp -	
ASET LAINNYA	Rp 1,685,413,000.00	Rp 13,820,313,073.00	720%
JUMLAH ASET	Rp 403,508,103,184.31	Rp 339,478,946,606.90	-16%

(Sumber : Laporan Keuangan BPPD Kota Bandung, Data diolah oleh penulis)

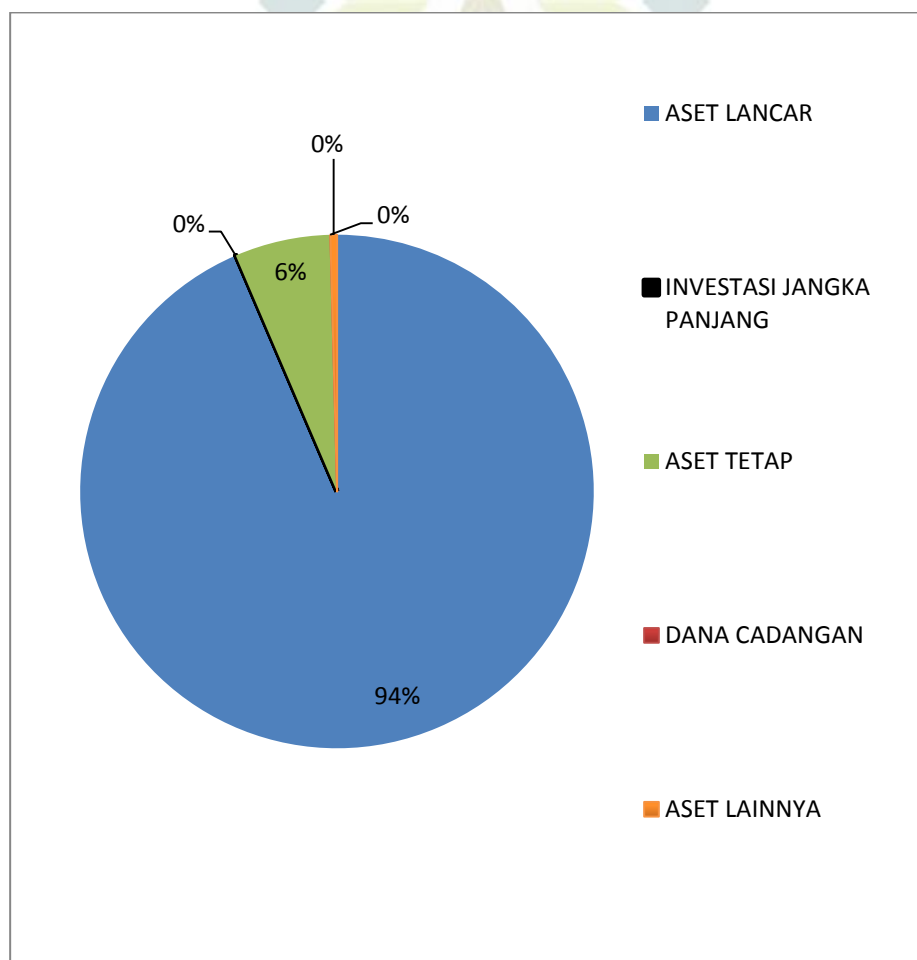
Berdasarkan tabel 1.2, dimana dapat dilihat pertumbuhan jumlah akun pada akun aset lainnya hingga 720% hal ini menunjukkan nilai positif. Namun pada akun-akun lainnya mengalami nilai negatif , yang artinya akun tersebut tidak mengalami pertumbuhan , bahkan tidak mencapai pada jumlah aset yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Seperti aset lancar (-18%), aset tetap (-38%), dan jumlah total aset (-16%). Nilai aset tetap yang tidak tumbuh hingga 38%, diindikasikan dengan adanya perubahan nomenklatur, yang semula Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang beralamat di Jl. Cianjur No. 24 Bandung, namun kini menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang menjadi bagian kompleks pemerintah Kota Bandung di Jl. Wastukencana No.2 Bandung. Pasalnya, perubahan ini terkait dengan pemindahan gedung dan harta kekayaan dikantor sebelumnya, yang kini berubah nilainya secara signifikan di gedung kantor yang baru. Selain dari pertumbuhan nilai aset, dapat dilihat dari proporsi nilai masing-masing akun aset dalam neraca, terhadap nilai total keseluruhan nilai aset yang dimiliki BPPD Kota Bandung dibawah ini :

Tabel 1.3
Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset BPPD Kota Bandung 2016-
2017

Kategori Aset	31 Des 2016	% dari Total Aset	31 Des 2017	% dari Total Aset
Aset Lancar	Rp 377,498,757,350.31	93.55%	Rp 310,672,119,408.90	91.51%
Investasi Jangka Panjang	Rp -	0.00%	Rp -	0.00%
Aset Tetap	Rp 24,323,932,834.00	6.03%	Rp 14,986,514,125.00	4.41%
Dana Cadangan	Rp -	0.00%	Rp -	0.00%
Aset Lainnya	Rp 1,685,413,000.00	0.42%	Rp 13,820,313,073.00	4.07%
Total Aset	Rp 403,508,103,184.31		Rp 339,478,946,606.90	

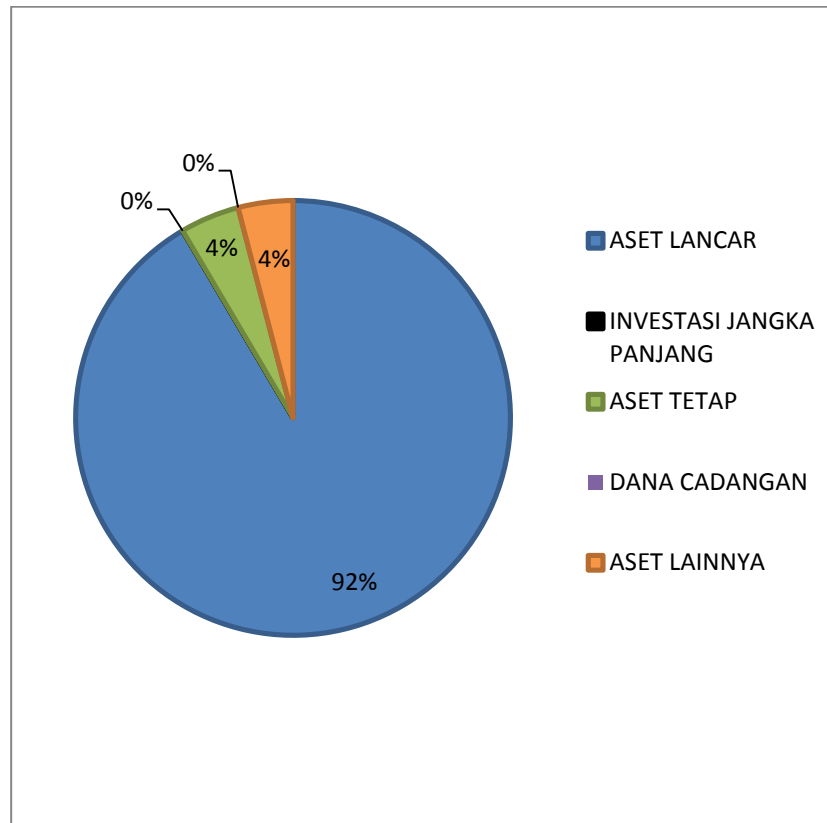
(Sumber: Laporan Keuangan BPPD Kota Bandung 2017, Data diolah oleh peneliti)

Gambar 1.2
Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset BPPD Kota Bandung 2016



(Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah oleh penulis)

Gambar 1.3
Proporsi Kelompok Aset Terhadap Total Aset BPPD Kota Bandung 2017



(Sumber: Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung, data diolah oleh penulis)

Dari gambar 1.2 dan gambar 1.3 terlihat bahwa terjadi perubahan proporsi kelompok aset terhadap total aset. Dimana terjadi penurunan proporsi aset tetap ditahun 2016 sebesar 6,03%, sedangkan di tahun 2017 hanya 4,41%. Namun terjadi kenaikan pada akun aset lainnya pada tahun 2016 hanya 0,42% kemudian ditahun 2017 mencapai 4,07% dari keseluruhan total aset. Pada akun-akun seperti investasi jangka panjang dan dana cadangan masih bernilai 0 baik ditahun 2016 maupun di tahun 2017.

Membandingkan data neraca dua periode atau lebih bertujuan untuk mengetahui adanya kenaikan atau penurunan jumlah absolut (dalam rupiah) dan

dalam persentase. Analisis perbandingan tersebut biasanya juga dilengkapi dengan rasio. Rasio ini dihitung dengan cara membagi jumlah rupiah tahun sebelumnya sebagai tahun dasar (Jumingan, 2014:45).

Melihat kondisi penurunan total aset secara signifikan pada laporan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung penulis tertarik untuk menelitinya menggunakan analisis rasio keuangan dengan judul *“Analisis Aset Pemerintah Daerah di Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2016-2017”*

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai penurunan nilai akun-akun aset pada neraca, terlebih setelah adanya perubahan nomenklatur pada BPPD Kota Bandung. Dengan terjadinya penurunan aset, penulis akan menganalisis bagaimana kemampuan BPPD Kota Bandung dalam memenuhi kewajibannya serta indikator apa saja yang memengaruhi penurunan aset tersebut. Selain itu bagaimana kondisi keuangan BPPD Kota Bandung dengan terjadinya penurunan aset yang signifikan pada tahun anggaran 2016-2017.

C. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi aset pada laporan neraca BPPD Kota Bandung setelah adanya perubahan nomenklatur ?
2. Bagaimana kemampuan BPPD Kota Bandung dalam memenuhi kewajibannya?

3. Mengapa terjadi penurunan aset yang signifikan pada BPPD Kota Bandung di tahun 2016-2017?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian untuk menganalisis aset pada laporan keuangan BPPD Kota Bandung setelah terjadi perubahan nomenklatur, serta untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan BPPD Kota Bandung, kemampuan BPPD Kota Bandung memenuhi kewajibannya, dan indikator apa saja yang melatar belakangi adanya penurunan aset.

Sehingga dari penelitian yang diteliti oleh penulis terhadap analisis aset laporan keuangan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Kota Bandung, penulis dapat memberikan saran bagi Badan Pengelolaan dan Pendapatan Kota Bandung agar dapat meningkatkan kinerja keuangan SKPD BPPD Kota Bandung pada periode selanjutnya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini untuk mengembangkan teori keuangan daerah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya. Keuangan daerah ini meliputi analisis aset tersebut menggunakan Rasio Likuiditas yang didalamnya terdiri dari rasio lancar, rasio kas, rasio cepat, dan rasio modal kerja terhadap total aset; Rasio Solvabilitas; dan Rasio Utang yang terdiri dari Rasio Utang terhadap Ekuitas dan Rasio Utang terhadap Aset Modal.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Entitas Pelapor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat kinerja Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kota Bandung dari waktu ke waktu selama periode 2016-2017, sehingga BPPD Kota Bandung dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar tetap terpacu untuk meningkatkan kualitas kerjanya untuk periode selanjutnya.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kota Bandung.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literatur dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi Sektor Publik.

d. Bagi Penulis

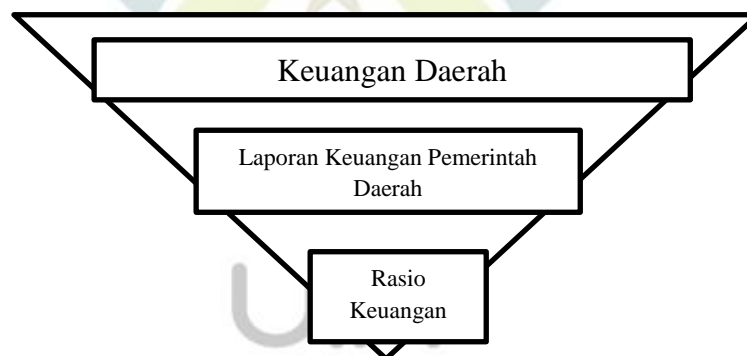
Penelitian ini memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang bagaimana cara menghitung analisis aset pada laporan keuangan BPPD Kota Bandung sebagai bentuk penilaian kinerja laporan keuangan agar selanjutnya dapat mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang diakibatkan penurunan aset pada laporan keuangan BPPD Kota Bandung. Serta

sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan penulis pada tingkat strata 1.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep teori yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan konsep piramida terbalik. Konsep ini dimulai dari *Grand Theory* yaitu Keuangan Daerah, *Middle Theory* yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan *Operasional Theory* yaitu Rasio Keuangan. Skema konsep teori tersebut dapat digambarkan oleh peneliti sebagai berikut:

Gambar 1.4
Skema Kerangka Pemikiran



(Sumber, Data Diolah Oleh Peneliti 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Keuangan Daerah

Baldric Siregar (2015: 12) mendefenisikan keuangan daerah sebagai berikut

“Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban

daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.”

Dalam pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keuangan daerah termasuk pada pendapatan dan pengeluaran negara yang nantinya dapat diubah dalam bentuk aset milik daerah. Aset milik daerah ini salah satunya terdapat pada satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian perlu adanya analisis terkait kondisi aset pada SKPD Badan Pendapatan dan Pengelolaan Daerah Kota Bandung.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dadang Suwanda (2015: 66) laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

“Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.”

Dadang menegaskan dalam pengertian diatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagai tolok ukur kinerja pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terdapat lima komponen laporan keuangan diantaranya : LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK. Dalam laporan neraca BPPD Kota Bandung terdapat akun aset, salah satu tolok ukur ini dapat dinilai melalui analisis aset pada laporan keuangan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada periode 2016-2017.

3. Rasio Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:90) menjelaskan defenisi rasio keuangan sebagai berikut:

“Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis.”

Rasio keuangan ini menjadi bagian dari analisis aset yang didalamnya terdapat komponen rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio utang.

G. Proporsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, melihat kondisi penurunan nilai absolut aset lancar, aset tetap, dan jumlah keseluruhan aset. Penulis khawatir dengan adanya penurunan nilai absolut serta perubahan nomenklatur BPPD Kota Bandung tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan optimal, dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang.